



FEB

Lembaga
Demografi

MODUL – 1 KONSEP DASAR DEMOGRAFI

Modul 1

KONSEP DASAR DEMOGRAFI



Tim Penyusun:

Omas Bulan Samosir, Ph.D
Rihlah Romdoniah, S.E.
Israul Hasanah, S.E.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Modul Demografi: Suatu Pengantar telah tersusun. Sehingga Modul **“Konsep Dasar Demografi”** dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta yang tergabung dalam Diklat Teknis Dasar-Dasar Demografi bagi ASN BKKBN, PLKB/PKB, Mitra kerja, maupun Motivator.

Dengan adanya misi BKKBN dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan maka semua pegawai BKKBN baik di pusat dan daerah harus memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar demografi.

Modul ini disusun atas Kerjasama Pusdiklat Kependudukan dan KB, BKKBN RI dengan Lembaga Demografi FEB UI. Modul pelatihan ini masih perlu dikembangkan oleh masing-masing pengguna dan ditindak lanjuti melalui praktek langsung di lapangan dalam memenuhi kebutuhan operasional serta dari sumber kepustakaan. Saran dari berbagai pihak untuk menyempurnakan bahan ajar sangatlah kami harapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya modul pelatihan ini. Semoga modul ini dapat memberikan manfaat kepada setiap peserta ajar dan pembacanya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul bagi Peserta.....	2
D. Tujuan Pembelajaran	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	4
F. PETUNJUK BELAJAR	5
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOGRAFI.....	6
A. Asal Usul Demografi	6
B. Tujuan dan Kegunaan Analisis Demografi.....	9
C. Pembagian Ilmu Demografi.....	10
D. Teori-teori Kependudukan	12
E. Latihan	33
F. Rangkuman.....	33
G. Evaluasi.....	34
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut	38
BAB III UKURAN-UKURAN DEMOGRAFI.....	39
A. Jumlah Absolut (Banyak) dan Konstanta.....	39
B. Angka, Persentase, Proporsi, dan Rasio	39
C. Insiden, Prevalensi, dan Kohor	42

D. Latihan	42
E. Rangkuman.....	43
F. Evaluasi.....	43
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	47
BAB IV SUMBER DATA KEPENDUDUKAN.....	48
A. Registrasi Vital	48
B. Sensus Penduduk.....	51
C. Survei Penduduk.....	56
D. Perbedaan data kependudukan menurut sumber data....	61
E. Isu Terkini	63
F. Latihan	65
G. Rangkuman.....	65
H. Evaluasi.....	65
I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	70
BAB V PENUTUP	71
A. Rangkuman.....	71
B. Evaluasi.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demografi adalah studi ilmiah tentang populasi manusia (penduduk), termasuk jumlah, persebaran, komposisi, dan faktor-faktor yang menentukan perubahan dalam jumlah, persebaran, dan komposisinya. Jadi, demografi fokus pada lima aspek dari penduduk: (1) jumlah, (2) distribusi, (3) komposisi, (4) komponen utama pertumbuhan penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), dan (5) determinan dan konsekuensi dari perubahan penduduk.

Modul 1 – Demografi: Suatu Pengantar, merupakan modul awal yang mengantarkan Anda untuk memahami modul-modul berikutnya dalam paket Pelatihan Teknis Dasar-Dasar Demografi.

B. Deskripsi Singkat

Modul 1 – Demografi: Suatu Pengantar, merupakan bahan pengajaran dan referensi dalam bidang kependudukan dan materi pengantar untuk mempelajari ilmu demografi secara mendalam. Sejarah dan perkembangan demografi, tujuan dan kegunaan ilmu demografi, pembagian ilmu demografi, teori-teori kependudukan, ukuran-ukuran demografi, sumber data kependudukan, dan isu-isu terkini demografi dibahas dalam modul ini.

C. Manfaat Modul bagi Peserta

Manfaat modul bagi peserta adalah sebagai bahan ajar dalam mata Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Dasar-Dasar Demografi agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dapat mengerti dan memahami istilah-istilah dalam demografi dan kaitannya dengan pembangunan dan Program KKBPK yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari materi ini Anda diharapkan mampu memahami demografi, ukuran-ukuran demografi, sumber data kependudukan, serta isu terkini demografi.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari materi ini Anda dapat

- menjelaskan pengertian demografi;
- menjelaskan sejarah dan perkembangan demografi;
- menjelaskan tujuan dan kegunaan ilmu demografi;
- menjelaskan pembagian ilmu demografi;
- menjelaskan teori-teori kependudukan;
- menjelaskan ukuran-ukuran demografi;
- menjelaskan sumber data kependudukan;
- menjelaskan isu-isu terkini demografi.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

I. Sejarah dan perkembangan demografi

1. Asal usul demografi
2. Tujuan dan kegunaan ilmu demografi
3. Pembagian ilmu demografi
4. Teori-teori kependudukan

II. Ukuran-ukuran demografi

1. Jumlah absolut (banyak) dan konstanta
2. Angka, proporsi, dan rasio
3. Insiden dan prevalensi

III. Sumber data kependudukan

1. Registrasi vital
2. Sensus penduduk
3. Survei penduduk

F. PETUNJUK BELAJAR

1. Bacalah dengan seksama indikator keberhasilan setiap bab karena indikator keberhasilan merupakan tolok ukur keberhasilan Anda dalam belajar.
2. Bacalah materi yang diberikan oleh Widyaiswara secara berurutan dengan seksama. Tanyakan apabila ada yang kurang dimengerti.
3. Diskusikan dengan teman-teman Anda bila ada masalah dalam penyusunan ataupun pengusulan angka kredit.
4. Kerjakan soal-soal latihan yang diberikan untuk mengukur kemampuan Anda.
5. Jangan melihat kunci jawaban terlebih dahulu sebelum Anda mengerjakan soal-soal latihan.
6. Untuk memperkaya pengetahuan carilah informasi dari sumber-sumber lain yang relevan.

Baiklah, selamat belajar! Semoga Anda sukses menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diuraikan dalam Mata Diklat Dasar-Dasar Demografi ini dan dapat melaksanakan tugas sehari-hari anda sebagai seorang ASN BKKBN secara lebih baik lagi.

BAB II

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN DEMOGRAFI

Indikator keberhasilan: Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menjelaskan sejarah dan perkembangan demografi.

A. Asal Usul Demografi

Demografi (*demography*) berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk dan *grafein* yang berarti menggambar atau menulis. Jadi, secara harfiah demografi berarti tulisan atau gambaran tentang penduduk. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Achille Guillard pada tahun 1855 dalam karyanya berjudul “*Elements de Statistique Humaine, ou Demographie Comparee*” atau *Elements of Human Statistics or Comparative Demography*.

Pengertian tentang demografi berkembang seiring dengan perkembangan keadaan penduduk serta penggunaan statistik kependudukan yang dialami oleh para tokoh demografi pada zamannya. Seperti dapat dilihat pada Tabel 1, pengertian demografi pada abad 18 dan 19 hanya mencakup perubahan penduduk yang disebabkan oleh kelahiran dan kematian

karena mobilitas penduduk antarwilayah yang relatif masih rendah. Pada abad 20, pengertian demografi sudah memasukkan migrasi serta keterkaitan antara jumlah, distribusi, komposisi, komponen utama pertumbuhan penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi), dan determinan dan konsekuensi dari perubahan penduduk.

Tabel 1
Pengertian Demografi menurut Tokoh Demografi

No.	Tokoh	Demografi adalah
1.	Johan Süssmilch (1762)	ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan pada umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya.
2.	Achille Guillard (1855)	ilmu yang mempelajari segala sesuatu dari keadaan dan sikap manusia yang dapat diukur, yaitu meliputi perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitasnya, dan kondisi moralnya.
3.	David V. Glass (1953)	ilmu yang terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.
4.	Perserikatan Bangsa-Bangsa (<i>United Nations/UN</i>) (1958) dan International Union for the Scientific Study of Population/IUSSP	studi ilmiah mengenai masalah penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur, serta pertumbuhannya. Masalah demografi lebih ditekankan pada studi kuantitatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas,

	(1982)	dan migrasi, yang bersama dengan faktor lain, seperti perkawinan, perceraian, dan mobilitas sosial akan menentukan struktur atau komposisi penduduk.
5.	Phillip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan (1959)	ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahannya, dan sebab-sebab perubahan tersebut.
6.	Donald J. Bogue (1969)	ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang jumlah, komposisi dan distribusi penduduk dan perubahan-perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen demografi, yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial.
7.	George W. Barclay (1970)	ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk dan mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh dan bukan perorangan.

Pendiri, Bapak ilmu demografi adalah John Graunt (1620-1674), seorang warga negara Inggris. Graunt adalah pelopor dalam bidang pencatatan statistik penduduk. Dia menulis buku berjudul *Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index and Made Upon the Bills of Mortality* (Graunt 1662). Sebagian besar buku tersebut berisi analisis mortalitas, dan selebihnya mengenai fertilitas, migrasi, perumahan, data keluarga, perbedaan antara kota dan negara, dan jumlah penduduk laki-laki yang berada pada kelompok

umur militer. Data yang digunakan dalam analisis kematian dan kelahiran tersebut bersumber dari catatan kematian (*The Bills of Mortality*) yang diterbitkan secara berkala oleh petugas gereja setiap minggu. Dari hasil penelitiannya itu, Graunt mencetuskan “hukum-hukum” pertumbuhan penduduk.

B. Tujuan dan Kegunaan Analisis Demografi

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dan kegunaan ilmu demografi adalah sebagai berikut.

- a. Mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu, serta perubahan-perubahannya.
- b. Menjelaskan pertumbuhan penduduk pada masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang.
- c. Mengembangkan dan menganalisis hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan.

- d. Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang.

C. Pembagian Ilmu Demografi

Dalam kongres masalah kependudukan di Paris Adolphe Landry (1945) secara matematis membuktikan adanya hubungan antara unsur-unsur demografi, seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan umur. Landry menyarankan penggunaan istilah **demografi murni/formal (*pure/formal demography*)** untuk cabang ilmu demografi yang bersifat analitis-matematis untuk membedakannya dengan analisis kependudukan yang lebih luas sifatnya.

Demografi formal mengembangkan berbagai teknik perhitungan data kependudukan dengan menggunakan berbagai metode perhitungan dan estimasi untuk memperoleh gambaran penduduk dan variabel-variabel demografi lainnya baik pada waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang, berupa model-model atau rumus-rumus statistik dan

matematis (formal) yang menakjubkan dan mempunyai kegunaan yang besar.

Akan tetapi, demografi formal belum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, seperti tentang ‘mengapa’ suatu keadaan atau proses terjadi, seperti mengapa angka kelahiran di suatu daerah lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan di daerah lain dan mengapa angka kematian semakin menurun pada suatu kelompok penduduk sedangkan pada kelompok penduduk lain tetap tinggi. Artinya, masih ada faktor-faktor yang belum disentuh dalam formula matematik atau statistik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan disiplin ilmu lain untuk dapat menjawab atau menjelaskan “mengapa” terjadi perubahan-perubahan dalam variabel-variabel demografi.

Cabang ilmu demografi yang menjelaskan sebab (determinan) dan akibat (konsekuensi) perubahan-perubahan dalam variabel-variabel demografi disebut **studi kependudukan (*population studies*)**, **demografi sosiologi (*sociological demography*)**, atau **demografi sosial (*social demography*)**. Studi kependudukan menggunakan teori-teori atau kerangka pikir yang berasal dari disiplin ilmu lain,

seperti ekonomi, sosiologi, antropologi, epidemiologi, geografi, kesehatan masyarakat, biologi, ekologi, dan ilmu pengetahuan lingkungan. Studi kependudukan lebih memperjelas arti dari angka-angka variabel demografi hasil estimasi dari model-model matematik atau statistik (demografi formal).

Selanjutnya, Shryock dan Siegel (1976) membagi pengertian demografi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, demografi menekankan pada masalah jumlah, distribusi, struktur, dan pertumbuhan penduduk. Dalam arti luas, demografi mencakup semua karakteristik penduduk, termasuk di dalamnya budaya, sosial, dan ekonomi.

D. Teori-teori Kependudukan

Teori-teori kependudukan pada awalnya membicarakan hubungan antara penduduk dan keterbatasan sumber alam/pangan (penduduk optimum) dan hubungan antara penduduk dan lingkungan (*carrying capacity*/daya dukung). Teori-teori kependudukan berkembang karena kekuatiran

mengenai kesengsaraan yang ditimbulkan oleh kemiskinan. Berikut perkembangan teori kependudukan.

Teori kependudukan Cina kuno (Contoh: Konfusius 500 S.M.) membahas hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Teori ini berpendapat bahwa jumlah penduduk yang terlampau besar akan menekan standar hidup masyarakat terutama kalau jumlah penduduk dikaitkan dengan luas tanah atau lahan pertanian yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Teori ini juga berpendapat bahwa ada suatu proporsi yang ideal antara luas tanah dan jumlah penduduk. Teori ini menganjurkan agar pemerintah memindahkan penduduk ke daerah yang masih kekurangan penduduk sebagai pemecahan masalah kelebihan penduduk.

Teori kependudukan Yunani kuno (Contoh: Plato dan Aristoteles 300 S.M.) menganjurkan jumlah penduduk yang tepat dan ideal untuk sebuah kota. Teori ini berpendapat bahwa apabila sebuah kota tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ada maka diperlukan pembatasan kelahiran. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan penduduk maka

diperlukan insentif (pendorong) untuk menambah kelahiran. Sementara itu, teori kependudukan India kuno (Contoh: Kautilaya 300 S.M.) mengajukan ukuran desa optimum dan menganggap penduduk terlalu sedikit sebagai suatu kejahatan besar.

Teori kependudukan kekaisaran Roma (Contoh: Cicero 50 S.M.) mendorong pertumbuhan penduduk, sebagai contoh dengan memberikan keistimewaan kepada mereka yang mempunyai anak. Teori ini berpendapat bahwa lebih banyak laki-laki berarti lebih banyak kemenangan militer. Sementara itu, teori kependudukan Yudaisme mendukung pertumbuhan penduduk sesuai dengan perintah dalam Kitab Suci, yaitu “pergi dan berkembang biaklah.”

Teori kependudukan kekristenan awal (Contoh: Augustine dan Aguinias 400 M) menyatakan selibat secara moral adalah baik, tetapi tingkat kelahiran yang tinggi diperlukan untuk menghadapi tingkat kematian yang tinggi. Teori ini secara moral tidak menyetujui aborsi, pembunuhan bayi, dan perceraian.

Teori kependudukan Merkantilisme (abad 17 dan 18) menyatakan bahwa intervensi negara dalam ekonomi dibutuhkan untuk memaksimalkan kekayaan nasional. Teori ini berpendapat bahwa penduduk yang meningkat akan berarti angkatan bersenjata yang lebih besar, upah per jam yang lebih rendah, dan kekayaan yang meningkat. Periode ini merupakan awal dari pertumbuhan penduduk dunia secara berkelanjutan dan juga analisis ilmiah data kependudukan oleh Graunt dan tokoh demografi lainnya.

Süssmilch (1762) membicarakan masalah penduduk berdasar “hukum Tuhan.” Dia menyatakan bahwa kelahiran dan kematian merupakan kehendak Tuhan. Pemikiran seperti itu berubah setelah abad ke-18, yang dikenal di Eropa sebagai zaman penalaran (*the age of reasons*), yakni zaman dimana sesuatu masalah dipertanyakan “mengapa” dan “bagaimana pemecahannya.” Kemiskinan terjadi dimana-mana yang mengakibatkan munculnya masalah-masalah sosial dan ekonomi. Para ahli dan ilmuwan berusaha membuat atau mengembangkan studi mengenai bagaimana mengatasi masalah kemiskinan yang dialami oleh penduduk. Banyak orang yang optimis dan percaya bahwa kemampuan atau

potensi manusia yang terus berkembang akan dapat memecahkan segala masalah yang timbul. Ada kalangan masyarakat yang pesimis.

Berbeda dengan Merkantilisme, Psiokrat (Contoh: Quesnay abad 18) mendukung pemerintahan oleh alam (*rule by nature* atau *laissez-faire*) dan tidak perlu intervensi pemerintah. Teori ini berpendapat bahwa penduduk tergantung pada nafkah penghidupan (subsistensi) dan pertanian adalah satu-satunya sumber kekayaan. Teori ini juga berpendapat bahwa manfaat dari reformasi sosial akan dibatalkan oleh penambahan penduduk.

Teori kependudukan yang paling dikenal adalah teori Malthus (1766–1834). Malthus mengajukan tiga proposisi besar. Pertama, penduduk dibatasi oleh sumber-sumber subsistensi/pangan. Kedua, penduduk dengan sendirinya akan meningkat kalau sumber-sumber subsistensi meningkat, kecuali kalau ada penghambat. Ketiga, penghambat tersebut, dan penghambat yang menekan kekuatan perkembangan penduduk, serta penahan dampaknya pada tingkat subsistensi,

semuanya dapat dipecahkan melalui ketahanan moral, kejahatan, dan kesengsaraan.

Malthus mengajukan teori kelebihan penduduk (*over population theory*). Argumentasinya adalah dorongan alamiah manusia untuk berkembang biak selalu dan akan selalu ada dan dengan kecepatan yang mengikuti deret ukur sehingga jumlah manusia akan menjadi dua kali lipat dalam waktu yang cukup pendek (sekitar 25 tahun). Malthus mengamati bahwa di koloni baru Inggris, Amerika Utara, tanah sangat luas dan kaya akan sumber-sumber alam, penduduk berkembang dengan amat pesat, menjadi dua kali lipat hanya dalam 25 tahun.

Malthus mengamati bahwa kecepatan berkembang biak manusia ini jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan kenaikan bahan makanan yang dapat diproduksi dari tanah yang tersedia (yang berkembang mengikuti deret hitung) dan pada gilirannya akan mengakibatkan kesengsaraan dan kelaparan. Malthus mengamati jumlah penduduk bertambah tiap generasi menurut deret ukur, sedangkan jumlah pangan tiap dua-puluh lima tahun mengikuti deret hitung. Jadi, pertumbuhan penduduk yang cepat dengan sumber-sumber

yang terbatas akan menyebabkan berlakunya hukum hasil yang menurun (*the law of diminishing return*) di sektor pertanian dan akhirnya terjadi keadaan stagnan.

Malthus berargumen ada dua cara untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk. Pertama, penghambat positif (*positive checks*), yaitu melalui bencana alam, kelaparan, penyakit menular, perang, dan pembunuhan. Kedua, penghambat yang bersifat pencegahan (*preventive checks*), yaitu melalui penundaan perkawinan dan selibat permanen. Di Eropa, penghambat yang bersifat pencegahan dilakukan dengan keluarga kecil dan usia perkawinan tinggi. Malthus tidak menduga masalah pertumbuhan penduduk dan kesejahteraannya dapat dipecahkan oleh revolusi industri.

Selanjutnya, teori kependudukan menghubungkan penduduk dan pembangunan ekonomi, yang dipicu oleh tulisan Malthus, *Essay on the Principle of Population*. Banyak ahli ekonomi pembangunan mendasari teori-teorinya pada variabel-variabel penduduk, seperti menyatukan teori-teori ekonomi dengan penentuan pemilihan besarnya fertilitas.

Teori ekonomi fertilitas yang termasuk dalam teori neoklasik berbeda dengan model Malthus. Teori ekonomi fertilitas didasari oleh teori baru ekonomi rumah tangga (*new home economics*), yang menyatakan bahwa seseorang dalam menentukan fertilitas akan melalui proses yang sama dengan apabila ia memutuskan sesuatu pilihan untuk mendapatkan barang dan jasa bagi keperluan rumah tangganya. Pilihan fertilitas dibatasi oleh informasi dan sumber-sumber yang ada, namun keputusan mereka dalam memilih jumlah anak tetap rasional dalam arti harus dapat memaksimumkan kesejahteraan mereka.

Teori ekonomi rumah tangga menyatakan bahwa anak-anak sebagai harta jaminan hari tua dan berkontribusi terhadap pendapatan keluarga dalam masyarakat tradisional. Pada saat pertumbuhan ekonomi modern berlangsung, keinginan untuk mempunyai anak berangsur menurun sehingga partisipasi angkatan kerja anak dan kesempatan kerja untuk anak-anak menurun. Meningkatnya pendapatan dan sistem jaminan sosial yang semakin baik menyebabkan para orang tua tidak lagi menggantungkan hari tuanya pada anak-anak mereka.

Teori ekonomi rumah tangga didasari oleh asumsi bahwa anak adalah barang normal (*normal goods*). Peningkatan pendapatan rumah tangga akan mengakibatkan peningkatan keinginan mempunyai anak. Akan tetapi, ada faktor-faktor lain yang menghilangkan keinginan tersebut sehingga yang terjadi adalah jumlah anak yang lebih sedikit. Pertama, meningkatnya harga relatif (*relative price*) dari anak dibandingkan dengan barang-barang lainnya: harga barang-barang dan jasa yang dikonsumsi oleh anak naik lebih cepat dibanding dengan harga barang dan jasa lainnya. Kedua, biaya kesempatan (*opportunity cost*) untuk memelihara anak meningkat sejalan dengan meningkatnya gaji dan upah.

Peningkatan pendidikan wanita telah mengakibatkan peningkatan upah dan partisipasi angkatan kerja wanita sehingga *opportunity cost* untuk memelihara anak juga naik. Untuk wanita, *price effect* dari naiknya upah lebih besar pengaruhnya dari pada *income effect*, yang mengakibatkan keinginan untuk mempunyai anak menurun. Sebaliknya, laki-laki lebih banyak waktunya untuk bekerja dan kurang waktunya untuk memelihara anak sehingga ketika upah

mereka naik, *income effect* menyebabkan keinginan mempunyai anak meningkat.

Selain itu, teori ekonomi rumah tangga menekankan pentingnya selera dalam penentuan fertilitas dengan mengasumsikan bahwa rumah tangga lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas anak. Akibatnya, orang tua lebih mementingkan pendidikan dan kesehatan anak serta aspek kualitas anak lainnya. Perimbangan antara kualitas dan kuantitas ini mengakibatkan menurunnya angka kelahiran.

Selanjutnya, Leibenstein (1954) mengaitkan masalah penduduk dengan ekonomi dalam bukunya "*A Theory of Economic-Demographic Development.*" Ia mengemukakan konsep perangkap keseimbangan tingkat rendah (*the low-level equilibrium trap*) yang menjelaskan perubahan demografi di negara-negara sedang berkembang. Argumennya adalah suatu kenaikan sedikit dalam pendapatan akan meningkatkan jumlah penduduk dan persediaan tenaga kerja, yang pada gilirannya akan menghapuskan pertumbuhan modal, produktivitas, dan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lainnya.

Ekonom klasik (Contoh: Adam Smith dan Ricardo abad 19) mengajukan konsep hasil tenaga kerja yang semakin berkurang (*diminishing returns to labor*). Penulis-penulis berikutnya, seperti Marshall, menekankan hasil tenaga kerja yang semakin bertambah (*increasing returns to labor*). Sementara itu, golongan Anti-Malthusians (Contoh: Hazlitt abad 19) berargumen bahwa penghambat yang bersifat pencegahan yang diajukan oleh Malthus akan lebih efektif.

Kemudian, golongan sosialis dan Marxisme (Contoh: Marx abad 19) mengajukan bahwa masalah penduduk atau kelebihan penduduk adalah hasil dari sistem perekonomian kapitalis dan akan dapat diselesaikan melalui reorganisasi masyarakat. Selanjutnya, kelompok Neo-Malthusians pada abad 19 dan 20 mengajukan pembatasan pertumbuhan penduduk melalui penggunaan pengendalian kelahiran. Malthus sendiri tidak menyetujui pengendalian kelahiran.

Teori kependudukan berikutnya yang paling dikenal adalah teori transisi demografis yang diajukan oleh ahli geografi Warren Thompson dari Amerika Serikat pada tahun 1929.

Teori ini dipakai untuk menyatakan perubahan yang terjadi terhadap tiga komponen utama pertumbuhan penduduk: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Konsep transisi demografi yang dikenal secara umum hanya memperhatikan perubahan pertumbuhan penduduk secara alamiah, yaitu faktor kelahiran dan kematian.

Teori transisi demografi menyatakan ada empat tahap dalam transisi demografi, yang didasarkan pada pengalaman perubahan pola fertilitas dan mortalitas yang terjadi di beberapa negara di Eropa pada masa lampau selama kurang lebih dua abad (Gambar 1.1). Pertumbuhan penduduk sangat rendah yang dihasilkan oleh perbedaan angka kelahiran dan kematian yang tinggi, sekitar 40–50 per seribu penduduk.

Tahap pertama disebut tahap sebelum revolusi industri (*pre-industrial*). Pada tahap ini jumlah kelahiran dan kematian yang sangat tinggi ini tidak terkendali setiap tahunnya. Panen yang gagal dan harga-harga yang tinggi telah menyebabkan kelaparan sehingga daya tahan tubuh terhadap penyakit sangat lemah. Keadaan ini diperparah dengan meluasnya

penyakit menular sehingga menyebabkan angka kematian tinggi.

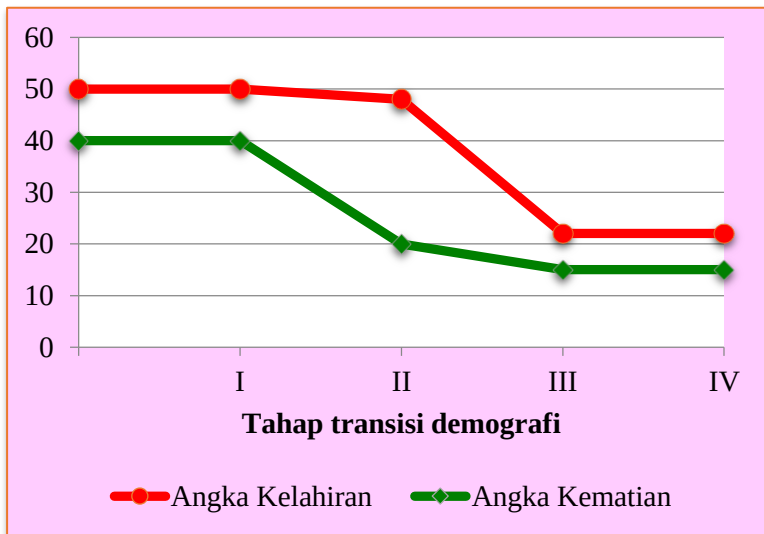
Tahap kedua disebut tahap awal revolusi industri (*early industrial*). Pada tahap ini angka kematian menurun dengan tajam akibat revolusi industri serta kemajuan teknologi dan juga mulai ditemukannya obat-obatan, terutama antibiotik. Sementara itu, angka kelahiran menurun amat lambat dan masih tetap tinggi, yang disebabkan karena kepercayaan atau pandangan mengenai jumlah anak banyak lebih menguntungkan. Menurunnya tingkat kematian dan masih tingginya tingkat kelahiran mengakibatkan jumlah penduduk meningkat dengan cepat.

Tahap ketiga adalah tahap revolusi industri (*industrial*). Pada tahap ini angka kematian terus menurun dengan kecepatan yang melambat. Angka kelahiran mulai menurun dengan tajam sebagai akibat dari perubahan perilaku melahirkan dan tersedianya alat/cara kontrasepsi serta adanya peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Di Eropa perubahan perilaku melahirkan terutama terjadi pada para wanita yang ingin berhenti melahirkan karena terlalu banyak anak

(*stopping behavior*). Di negara berkembang perubahan perilaku melahirkan dan diterimanya konsep keluarga kecil yang didukung oleh program keluarga berencana pemerintah sangat membantu menurunkan tingkat fertilitas.

Tahap keempat adalah tahap revolusi industri yang semakin maju (*mature industrial*). Pada tahap ini angka kelahiran dan kematian sudah mencapai angka yang rendah sehingga angka pertumbuhan penduduk juga rendah, yang dihasilkan dalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang maju.

Gambar 1.1
Tahap Transisi Demografi

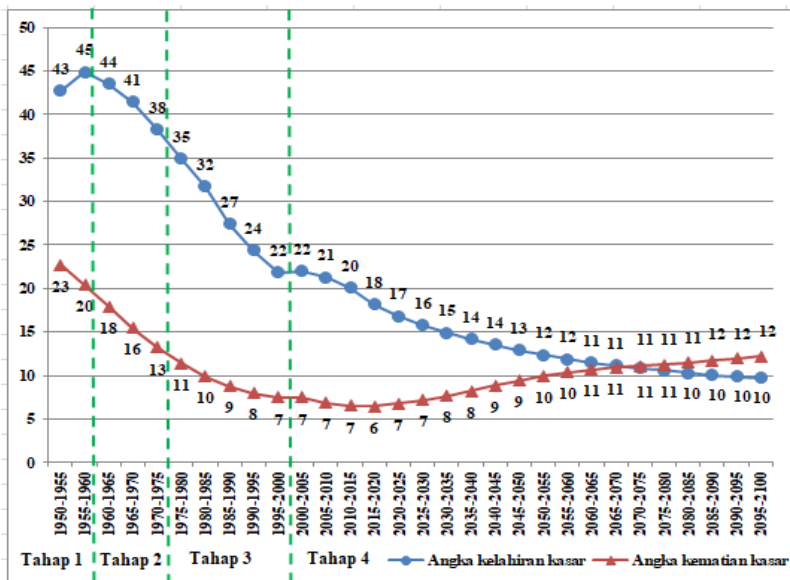


Transisi demografi di Indonesia dapat digambarkan berdasarkan data yang tersedia pada periode 1950–2100 yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN 2019). Seperti dapat dilihat pada Gambar 1.2, tahap pertama transisi demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada periode 1950–1960 ketika angka kelahiran kasar (*crude birth rate*/CBR) dan angka kematian kasar (*crude death rate*/CDR) tinggi, masing-masing, di atas 40 kelahiran dan di atas 20 kematian per seribu penduduk. Tahap kedua transisi demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada periode 1960–1975 ketika CBR masih tetap tinggi dan CDR sudah menurun secara nyata. Tahap ketiga transisi demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada periode 1975–2000 ketika CBR menurun secara nyata dan CDR menurun dengan kecepatan yang lebih lambat. Tahap keempat transisi demografi di Indonesia diperkirakan terjadi pada periode 2000–sekarang ketika CBR dan CDR sudah mencapai tingkat yang lebih rendah.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, memerlukan waktu yang lebih singkat, sekitar 50 tahun, untuk melalui keempat tahap transisi demografi. Hal ini

disebabkan karena program-program kesehatan dan keluarga berencana yang sudah maju di dunia dan diterapkan di negara-negara berkembang dalam rangka pengendalian penduduk dunia.

Gambar 1.2
Transisi Demografis Indonesia 1950–2100



Sumber: UN (2019) (Diolah oleh Penulis).

Berikutnya adalah pandangan terhadap teori Malthus dari teori fisiologis (alami) dan teori keadaan sosioekonomi yang menentang dalil Malthus yang menganggap daya reproduksi manusia merupakan sesuatu yang tidak akan mengalami

perubahan (*constant magnitude*). Tokoh-tokoh teori fisiologis meliputi Michael Thomas Sadler (1780–1835), Thomas Doubleday (1790–1870), Jose de Castro (1908–1973), Herbert Spencer (1820–1903), Pearl Raymond (1879–1940), dan Corrado Gini (1884–1965).

Sadler mengajukan bahwa ada hubungan terbalik antara daya reproduksi manusia dengan jumlah penduduk. Pekerjaan berat dan makanan sederhana akan menaikkan daya reproduksi, sementara banyak waktu luang dan makanan berat akan menekan daya reproduksi.

Sementara itu, Doubleday menyatakan bahwa kenaikan kemakmuran akan mengakibatkan turunnya daya reproduksi manusia. Kekurangan bahan makanan merupakan faktor perangsang daya reproduksi manusia. Kelebihan pangan merupakan faktor pengekang perkembangan penduduk. Penduduk negara-negara berkembang bertumbuh lebih cepat daripada penduduk negara-negara maju. Penduduk negara berkembang mengkonsumsi makanan vegetarian yang mengakibatkan daya reproduksi naik. Sementara itu,

penduduk negara maju mengkonsumsi daging sehingga daya reproduksi turun.

Castro (1953) menghubungkan tingkat kelahiran suatu negara dengan penggunaan kadar protein makanan. Jika banyak mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein hewani, seperti daging, telur dan susu, maka angka kelahiran rendah. Jika mengkonsumsi makanan yang kurang protein hewani maka angka kelahiran tinggi.

Spencer menyatakan semakin maju manusia mengembangkan dirinya, semakin banyak energi yang diperlukan untuk kemajuan itu dan semakin kurang energi yang tersedia bagi daya reproduksi manusia. Sementara itu, Raymond (1925) mengajukan bahwa kelebihan penduduk (*over population*) tidak akan mungkin timbul karena perkembangan manusia mengikuti pola kurva logistik.

Gini (1930) mengajukan bahwa lingkaran hidup manusia meliputi masa taruna (kuat energi), masa remaja (lebih tenang dan lebih menitikberatkan konsolidasi dan stabilisasi), dan masa tua (kemunduran tenaga). Setelah dicapai tingkat

pertumbuhan penduduk yang tinggi, dengan sendirinya suatu kehabisan tenaga pada daya reproduksi akan timbul sebagai akibat dari “metabolisme demografis (*demographic metabolism*)” dimana golongan atas mengalami penurunan fertilitas dan mengabsorpsi golongan menengah dan bawah. Sementara itu, golongan menengah berjuang dan menggunakan energi yang banyak untuk beralih ke golongan atas sehingga daya reproduksi mereka akan berkurang.

Dari sisi teori sosioekonomi, Kindleberger (1958) mengajukan bahwa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin banyak anak (*the rich get richer and the poor get more children*). Nassau William Senior (1790–1864) berargumen bahwa pengekang utama pertumbuhan penduduk adalah ketakutan akan timbulnya keadaan kekurangan pangan. Selanjutnya, Archibald Alison (1792–1867) berpendapat bahwa selama masih banyak tanah kosong di dunia, selama itu belum ada bahaya *overpopulation*. Kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan lebih besar daripada pertumbuhan penduduk. Kenaikan taraf hidup, kemajuan kebudayaan, dan ilmu pengetahuan mengekang pertumbuhan penduduk karena manusia makin banyak

menggunakan rasio dan makin kurang keinginan untuk mempunyai anak.

Kemudian Knut Wicksell (1851–1926) mengajukan teori penduduk optimum dengan menentukan jumlah penduduk yang paling menguntungkan untuk suatu negara dan mencari keseimbangan antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian agar dapat mempertahankan keadaan yang menguntungkan tersebut. Dia berkesimpulan bahwa *over population* hanya mungkin dalam alam statis dan jika penambahan penduduk diikuti dengan penurunan pendapatan rata-rata maka tingkat penduduk optimum sudah dilampaui.

Hayek (1988) berargumen bahwa ide modern bahwa pertumbuhan penduduk mengancam pemiskinan di seluruh dunia adalah semata-mata suatu kesalahan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh terlalu menyederhanakan teori kependudukan Malthus. Menurut Hayek teori Thomas Malthus merupakan suatu pendekatan pertama yang masuk akal terhadap masalah kependudukan pada masanya, tetapi kondisi modern membuatnya tidak relevan.

Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat, George Bush (1991) dalam salah satu pidatonya menyatakan bahwa setiap orang mewakili tangan yang bekerja, dan bukan hanya mulut yang harus diberi makan. Pertumbuhan penduduk dapat menjadi aset atau kewajiban tergantung pada faktor-faktor seperti kebijakan ekonomi pemerintah, praktik-praktik pertanian, dan kemampuan negara untuk membuat laki-laki dan perempuan bekerja. Karena penduduk adalah produsen dan juga konsumen, pertumbuhan penduduk dapat juga dipandang sebagai suatu sumber kekuatan.

Simon (1996) mengajukan bahwa sumber daya utama adalah penduduk, yang terampil, bersemangat, dan penuh harapan, yang akan menggunakan kehendak dan imajinasi mereka untuk keuntungan mereka dan semua orang. Selanjutnya, hasil studi Rajagukguk (2010) menemukan bahwa dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi proporsional terhadap pertumbuhan penduduk. Artinya, dalam jangka panjang, demi pertumbuhan ekonomi dibutuhkan pertumbuhan penduduk.

E. Latihan

Untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi ini, kerjakan soal-soal berikut ini.

1. Secara harfiah, apa arti kata “demografi?”
2. Mengapa John Graunt dinyatakan sebagai Bapak Demografi?
3. Jelaskan cara menghambat pertumbuhan penduduk yang diajukan oleh Malthus!
4. Jelaskan tahap-tahap dalam teori transisi demografis!

F. Rangkuman

Demografi adalah studi ilmiah mengenai perubahan dalam jumlah, struktur umur dan jenis kelamin, dan persebaran penduduk yang disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, serta keterkaitannya dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Analisis demografi bermanfaat untuk mempelajari perubahan penduduk serta determinan dan konsekuensinya pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.

G. Evaluasi

1. Buatlah suatu esai (satu halaman) mengenai teori kependudukan yang dianut oleh Pemerintah Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga saat ini.
2. Agar anda dapat mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi dalam kegiatan belajar ini, sebaiknya anda mengerjakan soal-soal di bawah ini.

Petunjuk

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang Anda anggap paling benar.

1. Demografi (*demography*) berasal dari dua kata yaitu *demos* dan *grafein* yang memiliki arti
 - a. Rakyat dan wilayah
 - b. Rakyat dan pemerintah
 - c. Menulis dan menggambar
 - d. Rakyat dan menulis
2. Tokoh berikut yang dinyatakan sebagai Bapak Demografi
 - a. John Graunt
 - b. Johan Süssmilch
 - c. David V. Glass

- d. Achille Guillard
3. Demografi merupakan ilmu yang terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Teori ini dikemukakan oleh
 - a. John Graunt
 - b. Phillip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan
 - c. David V. Glass
 - d. George W. Barclay
 4. Demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab-sebab perubahan tersebut. Teori ini dikemukakan oleh
 - a. John Graunt
 - b. Phillip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan
 - c. David V. Glass
 - d. George W. Barclay
 5. Demografi adalah ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk dan mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh dan bukan perorangan. Teori ini dikemukakan oleh
 - a. John Graunt

- b. Phillip M. Hauser dan Otis Dudley Duncan
 - c. David V. Glass
 - d. George W. Barclay
6. Shryock dan Siegel membagi ilmu demografi dalam arti luas dan sempit. Berikut ini merupakan variabel yang dianalisis dalam demografi secara sempit, kecuali
- a. Karakteristik sosial, ekonomi dan budaya penduduk
 - b. Distribusi penduduk
 - c. Struktur penduduk
 - d. Pertumbuhan penduduk
7. Berikut ini beberapa pendapatan dari Teori kependudukan Cina kuno (Contoh: Konfusius 500 S.M.), kecuali
- a. Membahas hubungan antara jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.
 - b. Mengajukan ukuran desa optimum dan menganggap penduduk terlalu sedikit sebagai suatu kejahatan besar.
 - c. Teori ini juga berpendapat bahwa ada suatu proporsi yang ideal antara luas tanah dan jumlah penduduk.
 - d. Teori ini menganjurkan agar pemerintah memindahkan penduduk ke daerah yang masih

kekurangan penduduk sebagai pemecahan masalah kelebihan penduduk.

8. Berikut ini yang benar tentang teori kependudukan kekaisaran Roma (Contoh: Cicero 50 S.M.)
 - a. Mendukung pertumbuhan penduduk sesuai dengan perintah dalam Kitab Suci, yaitu “pergi dan berkembang biaklah.”
 - b. Lebih banyak laki-laki berarti lebih banyak kemenangan militer.
 - c. Intervensi negara dalam ekonomi dibutuhkan untuk memaksimumkan kekayaan nasional.
 - d. Mendukung pemerintahan oleh alam (*rule by nature* atau *laissez-faire*) dan tidak perlu intervensi pemerintah.
9. Berikut cara menghambat laju pertumbuhan penduduk melalui *positive checks* menurut Malthus, kecuali
 - a. Kejahatan
 - b. Pengendalian kelahiran (KB)
 - c. Penyakit menular
 - d. Kesengsaraan

10. Teori ekonomi rumah tangga didasari oleh asumsi bahwa anak adalah
- a. Barang mewah
 - b. Barang inferior
 - c. Barang essential
 - d. Barang normal

H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kunci jawaban Evaluasi

- | | |
|------|-------|
| 1. D | 6. A |
| 2. A | 7. B |
| 3. C | 8. B |
| 4. B | 9. B |
| 5. D | 10. D |

BAB III

UKURAN-UKURAN DEMOGRAFI

Indikator keberhasilan: Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menjelaskan ukuran-ukuran demografi.

A. Jumlah Absolut (Banyak) dan Konstanta

Jumlah absolut (banyak) merupakan ukuran absolut dari suatu kejadian demografis di suatu wilayah pada waktu tertentu. Sebagai contoh adalah banyak penduduk, banyak kelahiran, banyak kematian, banyak penduduk datang, dan banyak penduduk pindah.

Konstanta adalah suatu bilangan tetap (konstan) yang dikalikan dengan bilangan pecahan untuk membuat bilangan pecahan tersebut lebih bermakna. Simbol konstanta adalah k . Sebagai contoh adalah 100, 1000, atau 100.000.

B. Angka, Persentase, Proporsi, dan Rasio

Angka (*rate*) adalah hasil bagi antara banyak suatu kejadian demografis terhadap banyak penduduk yang terpapar

terhadap kejadian tersebut dikalikan dengan konstanta. Angka merupakan ukuran relatif. Ada tiga macam angka, yaitu angka kasar (*crude rate*), angka spesifik (*specific rate*), dan angka bersih (*net rate*). Sebagai contoh adalah angka kelahiran kasar (*crude birth rate*), angka kelahiran umur tertentu (*age specific fertility rate*), dan angka migrasi bersih (*net migration rate*).

Persentase merupakan ukuran relatif dari suatu kelompok terhadap semua kelompok (lebih dari dua) dari suatu karakteristik demografis yang diperhatikan yang kemudian dikalikan dengan konstanta 100. Sebagai contoh adalah karakteristik yang diperhatikan adalah umur yang dibagi menjadi tiga kelompok besar 0–14, 15–64, dan 65 tahun ke atas sehingga menghasilkan persentase penduduk usia 0–14 tahun, persentase penduduk usia 15–64 tahun, dan persentase penduduk usia 65 tahun atau lebih.

Proporsi merupakan ukuran relatif dari suatu kelompok dari dua kelompok dari suatu karakteristik demografis yang diperhatikan. Proporsi dapat berupa angka desimal atau dapat dikalikan dengan konstanta 100. Sebagai contoh,

karakteristik yang diperhatikan adalah status perkawinan yang dibagi menjadi kawin dan tidak kawin sehingga menghasilkan proporsi penduduk kawin dan proporsi penduduk tidak kawin.

Rasio merupakan ukuran perbandingan antara kelompok-kelompok dari suatu karakteristik demografis yang diperhatikan. Rasio dapat juga merupakan perbandingan antara dua kejadian demografis. Rasio dapat dikalikan dengan konstanta 100 atau 100.000. Sebagai contoh, karakteristik yang diperhatikan adalah jenis kelamin yang menghasilkan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang merupakan perbandingan antara banyak penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Contoh lainnya adalah rasio kematian maternal (*maternal mortality ratio*) yang merupakan perbandingan antara banyak kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup.

C. Insiden, Prevalensi, dan Kohor

Insiden adalah banyak kejadian/kasus baru selama satu periode tertentu. Sebagai contoh, insidens penyakit muntaber selama bulan November 1983 di kota X ada 25 orang.

Prevalensi adalah banyak kejadian/kasus baru dan lama pada suatu periode tertentu. Sebagai contoh, prevalensi penyakit tuberkulosis selama tahun 1980 di kota X adalah 253 orang.

Kohor adalah sekelompok orang yang mempunyai pengalaman demografis pada waktu yang sama, biasanya satu tahun. Sebagai contoh, kohor kelahiran (*birth cohort*), kohor perkawinan (*marriage cohort*), dan kohor kelas sekolah (*school class cohort*).

D. Latihan

Untuk mengetahui tingkat pemahaman Anda terhadap materi ini, kerjakan soal-soal berikut ini.

1. Berikan contoh indikator demografi berupa angka!
2. Berikan contoh indikator demografi berupa proporsi!

3. Berikan contoh indikator demografi berupa persentase!
4. Berikan contoh indikator demografi berupa rasio!
5. Berikan contoh indikator demografi berupa insidens!
6. Berikan contoh indikator demografi berupa prevalensi!

E. Rangkuman

Ukuran-ukuran demografi dapat digolongkan menjadi ukuran absolut dan relatif. Ukuran absolut adalah jumlah absolut (banyak). Ukuran relatif terdiri dari angka, persentase, proporsi, rasio, insidens, dan proporsi.

F. Evaluasi

1. Buatlah suatu esai (satu halaman) tentang ukuran demografi yang menurut Anda penting bagi pelaksanaan tugas Anda.
2. Agar anda dapat mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi dalam kegiatan belajar ini, sebaiknya anda mengerjakan soal-soal di bawah ini.

Petunjuk

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang Anda anggap paling benar.

1. Banyaknya kejadian/kasus baru selama satu periode tertentu merupakan pengertian dari
 - a. Prevalensi
 - b. Insiden
 - c. Kohor
 - d. Rasio
2. Banyak kejadian/kasus baru dan lama pada suatu periode tertentu merupakan pengertian dari
 - a. Prevalensi
 - b. Insiden
 - c. Kohor
 - d. Rasio
3. Perbandingan antara dua kejadian demografis merupakan pengertian dari
 - a. Prevalensi
 - b. Insiden
 - c. Kohor
 - d. Rasio
4. Berikut ini pengertian yang sesuai dengan Kohor

- a. Ukuran relatif dari suatu kelompok terhadap semua kelompok (lebih dari dua) dari suatu karakteristik demografis yang diperhatikan yang kemudian dikalikan dengan konstanta 100.
 - b. Sekelompok orang yang mempunyai pengalaman demografis pada waktu yang sama.
 - c. Ukuran relatif dari suatu kelompok dari dua kelompok dari suatu karakteristik demografis yang diperhatikan.
 - d. Perbandingan antara banyak kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup.
5. Bilangan tetap yang dikalikan dengan bilangan pecahan untuk membuat bilangan pecahan tersebut lebih bermakna disebut sebagai
- a. Jumlah absolut
 - b. Proporsi
 - c. Konstanta
 - d. Angka
6. Berikut ini yang benar tentang pengertian rasio, kecuali
- a. Ukuran perbandingan antara kelompok-kelompok dari suatu karakteristik demografis yang diperhatikan.
 - b. Perbandingan antara dua kejadian demografis.
 - c. Karakteristik yang diperhatikan misalnya jenis kelamin.

- d. Karakteristik yang diperhatikan adalah umur, misalnya penduduk usia 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun atau lebih
7. *Crude rate*, *specific rate*, dan *net rate* merupakan contoh yang tepat untuk
- a. Jumlah absolut
 - b. Proporsi
 - c. Konstanta
 - d. Angka
8. Ukuran absolut dari suatu kejadian demografis di suatu wilayah pada waktu tertentu, merupakan pengertian dari
- a. Banyak
 - b. Proporsi
 - c. Konstanta
 - d. Angka
9. Status perkawinan yang dibagi menjadi kawin dan tidak kawin merupakan salah satu contoh yang tepat untuk konsep
- a. Banyak
 - b. Proporsi
 - c. Konstanta
 - d. Angka

10. Ukuran relatif dari suatu kelompok terhadap semua kelompok (lebih dari dua) dari suatu karakteristik demografis yang diperhatikan
- a. Persentase
 - b. Proporsi
 - c. Rasio
 - d. Angka

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kunci jawaban Evaluasi

- | | |
|------|-------|
| 1. B | 6. D |
| 2. A | 7. D |
| 3. D | 8. A |
| 4. B | 9. B |
| 5. C | 10. A |

BAB IV

SUMBER DATA KEPENDUDUKAN

Indikator keberhasilan: Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat menjelaskan sumber data kependudukan.

Data kependudukan adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik penduduk suatu populasi. Data kependudukan terdiri dari jumlah, pertumbuhan, distribusi umur, distribusi jenis kelamin, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi penduduk serta kondisi sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, politik, hukum, keamanan, dan lain-lain. Data kependudukan diperoleh dari upaya pengumpulan data dengan cara sensus penduduk, survei penduduk, kompilasi produk administrasi yang berkaitan dengan kependudukan, dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

A. Registrasi Vital

Sumber data kependudukan yang utama adalah sistem registrasi vital (sistem administrasi kependudukan). Sistem registrasi vital adalah suatu kegiatan pencatatan mengenai

kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, termasuk pengakuan pengesahan, pembatalan, dan perpisahan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Di Indonesia, sistem registrasi vital dilaksanakan melalui suatu sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Menurut Undang Undang No. 13 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, SIAK adalah “sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan,” “administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain” dan “data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.” Dokumen kependudukan yang dihasilkan

melalui SIAK antara lain adalah nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta nikah, akta kelahiran, dan akta kematian.

Berbeda dengan SP dan survei dimana petugas pencacah mendatangi penduduk untuk mengumpulkan informasi kependudukan, sistem administrasi kependudukan sangat tergantung pada kesadaran penduduk untuk melaporkan kejadian vital yang dialami, yaitu kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan, meskipun UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa pemerintah harus aktif melakukan pendataan penduduk. Akibatnya, cakupan sistem registrasi vital belum menyeluruh karena belum semua penduduk menyadari pentingnya pelaporan peristiwa vital yang dialami, terutama penduduk yang berpendidikan rendah, berpendapatan rendah, serta tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Pada tahun 2003 sistem registrasi vital di Indonesia dikembangkan menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mencakup pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Di Indonesia, sistem registrasi vital merupakan wewenang Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hasil registrasi vital dapat diakses di Portal Sistem Informasi Geografis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (Gambar 1.3).

Gambar 1.3
Portal Sistem Informasi Geografis
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia



B. Sensus Penduduk

Sensus Penduduk (SP) adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua penduduk di seluruh

wilayah (negara) secara serentak dan secara berkala untuk memperoleh data kependudukan pada waktu tertentu. SP biasanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Keunggulan dari SP adalah pencacahan dilakukan terhadap semua penduduk, baik penduduk *de jure* maupun penduduk *de facto*. Keterbatasannya adalah informasi yang dikumpulkan tidak terperinci dan memerlukan biaya yang sangat besar. Sebagai contoh, informasi terperinci tentang kelahiran, seperti jenis kelamin anak, tidak dikumpulkan dalam SP. Selain itu, penyelenggaraan SP 2010 di Indonesia menghabiskan biaya yang besar.

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan bahwa SP dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sejak kemerdekaan Indonesia sudah melaksanakan SP sebanyak enam (6) kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Data kependudukan utama yang dihasilkan berdasarkan SP antara lain adalah jumlah, distribusi umur dan jenis kelamin, persebaran, tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi penduduk. Hasil SP dapat diakses di laman (*website*) BPS

www.bps.go.id (Gambar 3.4). Secara khusus, hasil SP 2010 dapat diakses di www.sp2010.bps.go.id (Gambar 3.5).

Gambar 3.4
Laman Badan Pusat Statistik



Gambar 3.5
Laman Sensus Penduduk 2010



Pada tahun 2020 Indonesia menyelenggarakan SP yang ketujuh. Tujuan SP 2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk menuju satu data kependudukan Indonesia. Keistimewaan dari SP 2020 adalah memanfaatkan data administrasi kependudukan sebagai basis data dasar penduduk menurut satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil serta menggunakan metode kombinasi dalam pengumpulan datanya.

Metode kombinasi meliputi *computer aided web interviewing* (CAWI), *computer-assisted personal interviewing* (CAPI), dan *paper and pencil interviewing* (PAPI). Dengan CAWI, penduduk mengisi sendiri jawaban pada daftar pertanyaan (kuesioner) yang ditaruh di link sensus.bps.go.id (metode *online*). Sasaran CAWI adalah kelompok penduduk yang memiliki akses Internet. Dengan CAPI, petugas sensus, enumerator, mendatangi penduduk, melakukan wawancara, dan mengisi jawaban penduduk pada kuesioner yang ada dalam aplikasi sensus yang ada pada gadget (tablet/telepon genggam) pewawancara. Dengan PAPI, enumerator mendatangi penduduk dan melakukan wawancara dan mengisi jawaban penduduk pada dokumen kuesioner yang

ada pada enumerator (metode *offline*). Sasaran CAPI dan PAPI adalah kelompok penduduk yang tidak memiliki akses Internet, terutama di wilayah perdesaan dan yang sulit dijangkau.

Pandemi penyakit yang disebabkan oleh virus korona (*corona virus disease/COVID-19*) telah mengakibatkan diperpanjangnya periode pengisian kuesioner dengan menggunakan metode CAWI hingga 29 Mei 2020. Sementara itu, pengisian kuesioner dengan metode CAPI dan PAPI diubah menjadi metode menaruh dan mengambil (*drop off and pick up/DOPU*) kuesioner. Artinya, penduduk akan melakukan sendiri pengisian kuesioner yang ditaruh (*drop off*) oleh petugas sensus yang kemudian akan mengambil (*pick up*) kuesioner jika sudah diisi. Selanjutnya, pandemi COVID-19 juga mengakibatkan anggaran SP 2020 dipangkas hingga tinggal 25% dari USD 299 juta (sekitar Rp.4,9 triliun) menjadi USD 74 juta (sekitar Rp.1,1 triliun) atau dari USD 1,11 (Rp.16.650) per kapita menjadi USD 0,28 (Rp.4.200) per kapita.

C. Survei Penduduk

Survei adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sebagian dari penduduk (sampel) untuk memperoleh data kependudukan yang lebih terperinci pada waktu tertentu. Seperti halnya dengan SP, penduduk yang dicacah dalam survei juga penduduk *de jure* dan penduduk *de facto*. Survei juga dilaksanakan secara berkala dengan rentang waktu yang lebih pendek daripada SP.

Keunggulan survei adalah informasi kependudukan yang dikumpulkan lebih terperinci dan terkini. Sebagai contoh, informasi tentang jenis kelamin anak yang lahir dalam lima tahun terakhir dikumpulkan dalam survei demografi dan kesehatan, sementara informasi tentang pengeluaran dan konsumsi dikumpulkan dalam survei sosial dan ekonomi.

Keterbatasan dari survei adalah informasi dikumpulkan dari sebagian penduduk (sampel) sehingga terdapat kemungkinan terjadi kesalahan dalam pemilihan sampel (*sampling errors*). Akan tetapi, dalam prakteknya kesalahan *sampling* dalam survei diupayakan serendah mungkin sedemikian rupa

sehingga data kependudukan yang dihasilkan secara statistik dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian program-program pembangunan.

Ada beberapa survei kependudukan yang dilaksanakan secara berkala di Indonesia. Tiga survei dilaksanakan oleh BPS. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali setelah SP terakhir untuk menghasilkan data kependudukan antara dua SP. Indonesia sudah melaksanakan SUPAS sebanyak lima (5) kali, yaitu pada tahun 1976, 1985, 1995, 2005, dan 2015. Data kependudukan yang dihasilkan berdasarkan SUPAS sebagian besar sama dengan yang dihasilkan berdasarkan SP. Akan tetapi, data yang terperinci tentang migrasi dan administrasi kependudukan tersedia dalam SUPAS.

Sejak tahun 1963 Indonesia melaksanakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Selama periode 1990–2010 SUSENAS diselenggarakan setiap tahun. Mulai tahun 2011 SUSENAS dilaksanakan setiap tiga bulan (triwulan). Informasi terperinci tentang kependudukan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, perumahan, serta konsumsi

dan pengeluaran dikumpulkan dalam SUSENAS untuk menghasilkan data kependudukan, sosial, ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Hasil SUSENAS digunakan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan, termasuk program pengentasan kemiskinan dan tujuan pembangunan milenium (*millennium development goals/MDGs*), seperti persentase rumah tangga dengan sumber air minum yang layak dan persentase rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja yang layak.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) merupakan survei khusus untuk menghasilkan data ketenagakerjaan, seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat kesempatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, pendapatan, dan jam kerja. SAKERNAS pertama kali dilaksanakan pada tahun 1976. Sejak tahun 2012 SAKERNAS dilaksanakan setiap bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Hasil SAKERNAS digunakan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan ketenagakerjaan. Sekarang SAKERNAS dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

BPS juga melaksanakan survei kependudukan lain bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan lembaga internasional. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) diselenggarakan bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan ICF International. SDKI telah dilaksanakan sebanyak delapan (8) kali, yaitu pada tahun 1987, 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007, 2012, dan 2017. Data kependudukan terperinci yang berkaitan dengan fertilitas, perkawinan dan kegiatan seksual, mortalitas bayi dan anak, keluarga berencana (KB), kesehatan reproduksi, preferensi fertilitas, kesehatan anak, pemberian makanan anak, pengetahuan, sikap dan perilaku HIV/AIDS, pemberdayaan perempuan, partisipasi laki-laki dalam perawatan kesehatan keluarga, serta kematian maternal dan orang dewasa dihasilkan dari SDKI.

Hasil SDKI digunakan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan, termasuk tujuan pembangunan milenium (*millennium development goals/MDGs*) 1990–2015 dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) 2015–2030, seperti angka kematian bayi, angka

kematian anak usia bawah lima tahun, cakupan imunisasi campak pada anak usia satu tahun, angka prevalensi kontrasepsi, feritilitas pada perempuan remaja (usia 15–19 tahun), kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, dan rasio kematian maternal.

Survei tentang kesehatan penduduk di Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) dilaksanakan pada tahun 1986, 1995, 2001, dan 2004. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) diselenggarakan pada tahun 2007, 2010, 2013, dan 2018. Hasil RISKESDAS digunakan untuk mengevaluasi pencapaian pembangunan kesehatan dan MDGs dan SDGs bidang ekonomi, yaitu prevalensi anak usia bawah lima tahun yang kurang gizi. Hasil SKRT dan Riskesdas juga mengungkapkan tentang transisi epidemiologi di Indonesia dimana dominasi penyakit menular sebagai penyebab kematian utama telah digeser oleh penyakit tidak menular.

D. Perbedaan data kependudukan menurut sumber data

Salah satu isu penting data kependudukan adalah perbedaan data kependudukan menurut sumber data. Perbedaan data kependudukan antarsumber dapat disebabkan karena konsep dan definisi, cara, waktu, sampel populasi pengumpulan data, serta metode estimasi yang berbeda. Dalam hal jumlah penduduk, SP menggunakan konsep penduduk *de jure*¹ dan *de facto*², sementara sistem informasi administrasi menggunakan konsep penduduk *de jure*.

Dalam hal estimasi tingkat kelahiran, angka fertilitas total (*total fertility rate*/TFR) menurut hasil SP 2010 (2,41 anak per perempuan) berbeda dengan TFR menurut hasil SDKI 2012 (2,6 anak per perempuan). TFR menurut hasil SP 2010 diestimasi berdasarkan populasi seluruh perempuan Indonesia berusia 15–54 tahun, sementara TFR menurut hasil SDKI dihitung berdasarkan sampel perempuan usia 15–49 tahun. Selain itu, TFR menurut hasil SP 2010 dihitung dengan menggunakan metode tidak langsung, yaitu berdasarkan

¹ Penduduk *de jure* adalah penduduk berdasarkan tempat tinggal biasanya, yang ditunjukkan melalui kepemilikan dokumen kependudukan.

² Penduduk *de facto* adalah penduduk berdasarkan tempat dimana mereka ditemukan pada saat pencacahan.

jumlah anak lahir hidup dan kandung, jumlah perempuan usia 15–54 tahun serta tingkat kematian anak dan ibu. Sementara itu, TFR menurut hasil SDKI 2012 dihitung dengan menggunakan metode langsung, yaitu berdasarkan jumlah kelahiran dan jumlah perempuan usia 15–49 tahun. Periode acuan perhitungan juga berbeda antarsumber data. TFR menurut SP 2010 dihitung untuk tahun 2007, sementara TFR menurut SDKI 2012 dihitung untuk periode 2009–2012.

Data kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbeda antara yang dihasilkan oleh sensus/survei dan sistem informasi administrasi kependudukan. Idealnya, perbedaan ini dievaluasi dengan tujuan untuk memperkecil perbedaan tersebut dan untuk saling melengkapi. Upaya ini memerlukan koordinasi yang intensif antarpihak pengumpul data baik di pusat maupun daerah sehingga dicapai kesepakatan tentang hal-hal teknis dan nonteknis terkait dengan pengumpulan data kependudukan, seperti konsep, definisi, cara, waktu, dan metode estimasi data kependudukan. Koordinasi diharapkan menghasilkan target konsistensi data kependudukan antarsumber yang terukur. Cakupan administrasi kependudukan yang belum menyeluruh berarti sensus dan

survei masih sangat dibutuhkan di Indonesia sebagai sumber data kependudukan untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan.

E. Isu Terkini

Data kependudukan juga dapat diperoleh dari sumber-sumber lain. Sebagai contoh, Perserikatan Bangsa-Bangsa (2019) menyajikan data kependudukan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang untuk wilayah-wilayah dan negara-negara di dunia untuk periode 1950–2100 yang dapat diakses secara *online* dengan sangat mudah di laman [population.un.org.wpp](https://population.un.org/wpp). Selain itu, Bank Dunia (World Bank) juga menyajikan data kependudukan data kependudukan untuk tingkat nasional dan sub-nasional untuk negara-negara di dunia. Untuk Indonesia, data kependudukan tersedia hingga tingkat kabupaten/kota dan dapat diakses secara *online* di laman Indonesia Database for Policy and Economic Research (INDO-DAPOER) di <https://databank.worldbank.org/source/indonesia-database-for-policy-and-economic-research>.

Pemerintah Indonesia juga menghasilkan proyeksi penduduk Indonesia untuk tingkat nasional dan provinsi untuk periode 2000–2025, 2010–2035, dan 2015–2045. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, serta para ahli kependudukan di Indonesia. Proyeksi penduduk pada tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh BPS provinsi dengan mengacu kepada hasil proyeksi penduduk provinsi.

Terkait ketersediaan data, tidak semua data kependudukan tersedia pada tingkat wilayah yang lebih rendah, seperti kabupaten/kota. Hal ini disebabkan karena estimasi parameter kependudukan yang dihasilkan representatif (sampel cukup) untuk tingkat nasional dan provinsi. Estimasi parameter kependudukan pada tingkat kabupaten/kota belum memenuhi kecukupan sampel.

F. Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan data kependudukan!
2. Sebutkan sumber data kependudukan yang utama!
3. Sebutkan keistimewaan Sensus Penduduk 2020!
4. Sebutkan mengapa terjadi perbedaan data kependudukan menurut sumber data!

G. Rangkuman

Data kependudukan adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik penduduk suatu populasi. Sumber data kependudukan utama adalah registrasi vital, sensus penduduk, dan survei penduduk. Data kependudukan dapat berbeda menurut sumbernya yang disebabkan karena perbedaan dalam konsep dan definisi, cara, waktu, sampel populasi pengumpulan data, serta metode estimasi.

H. Evaluasi

1. Buatlah suatu esai (satu halaman) mengenai ketersediaan dan pemanfaatan data kependudukan di wilayah Anda!

2. Agar anda dapat mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi dalam kegiatan belajar ini, sebaiknya anda mengerjakan soal-soal di bawah ini.

Petunjuk.

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang Anda anggap paling benar.

1. Berikut ini yang paling sesuai dengan sensus penduduk
 - a. Informasi kependudukan yang dikumpulkan lebih terperinci dan terkini.
 - b. Penduduk yang dicacah dalam survei hanya penduduk *de jure*.
 - c. Penduduk yang dicacah dalam survei hanya penduduk *de facto*.
 - d. Memanfaatkan data administrasi kependudukan sebagai basis data dasar penduduk menurut satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil serta menggunakan metode kombinasi dalam pengumpulan datanya.
2. Berikut ini yang termasuk keterbatasan dari Sensus Penduduk
 - a. Pengumpulan data yang dilakukan secara serentak dan menyeluruh.

- b. Petugas pencacah mendatangi penduduk untuk mengumpulkan informasi kependudukan.
 - c. Pencacahan dilakukan terhadap semua penduduk, baik penduduk *de jure* maupun penduduk *de facto*.
 - d. Informasi yang dikumpulkan tidak terperinci dan memerlukan biaya yang sangat besar
3. Sejak kemerdekaan Indonesia sudah melaksanakan SP sebanyak enam (6) kali, yaitu pada tahun
- a. 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010
 - b. 1960, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010
 - c. 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 dan 2010
 - d. 1961, 1971, 1981, 1991, 2000 dan 2010
4. Perbedaan data kependudukan antarsumber salah satunya dapat disebabkan karena konsep yang digunakan. Konsep yang digunakan oleh sistem informasi administrasi yaitu
- a. *De facto*
 - b. *De jure*
 - c. *De facto dan de jure*
 - d. Survei
5. Berikut ini keuntungan dilaksanakan sensus penduduk adalah
- a. Jumlah penduduk tidak berubah

- b. Keadaan penduduk relatif akurat
 - c. Informasi penduduk tidak ada yang membantah
 - d. Data kependudukan diperoleh secara serentak
6. Berikut ini yang paling sesuai dengan survei penduduk
- e. Informasi kependudukan yang dikumpulkan lebih terperinci dan terkini.
 - f. Penduduk yang dicacah dalam survei hanya penduduk *de jure*.
 - g. Penduduk yang dicacah dalam survei hanya penduduk *de facto*.
 - h. Memanfaatkan data administrasi kependudukan sebagai basis data dasar penduduk menurut satuan lingkungan setempat (SLS) terkecil serta menggunakan metode kombinasi dalam pengumpulan datanya.
7. Berikut ini merupakan salah satu tujuan dari administrasi kependudukan
- a. Menjaga tingkat kepemilikan asset
 - b. Memberikan perlindungan atas hak sipil penduduk
 - c. Menghilangkan transformasi teknologi yang lambat
 - d. Melakukan pemerataan pendapatan
8. Konsep yang benar tentang pencatatan sensus penduduk, ketika pencatatan yang dilakukan merupakan pencatatan

- a. Keluarga
 - b. Rumah tangga
 - c. Individu
 - d. Tidak ada jawaban yang tepat
9. Berikut ini yang tidak termasuk keunggulan dari sensus penduduk yaitu
- a. Paling lengkap dan cukup akurat
 - b. *Complete coverage*
 - c. Dapat menyebabkan terjadinya *Content error*
 - d. Terbebas dari pengaruh kesalahan sampel (*sampling error*)
10. Berikut ini yang benar tentang perbedaan antara SP dan survei
- a. SP hanya mencacah sebagian (sampel), sedangkan survei seluruh penduduk dicacah.
 - b. SP seluruh penduduk dicacah, sedangkan survei hanya mencacah sebagian (sampel) penduduk saja.
 - c. SP dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan, sedangkan survei dilakukan secara periodik.
 - d. SP dilakukan untuk topik-topik yang lebih beragam, spesifik, rinci, dan sesuai kebutuhan, sedangkan

survei ditekankan pada keterangan demografis, sosial, dan ekonomi secara umum.

I. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Kunci jawaban Evaluasi

- | | |
|------|-------|
| 1. D | 6. A |
| 2. D | 7. B |
| 1. A | 8. C |
| 2. B | 9. C |
| 3. D | 10. B |

BAB V

PENUTUP

Selamat! Anda telah mempelajari mata diklat “Demografi: Suatu Pengantar” dengan sukses. Selanjutnya, untuk mengakhiri modul ini, Anda dipersilakan untuk mencermati sekali lagi rangkuman yang merupakan intisari konsep dasar demografi.

A. Rangkuman

Demografi adalah studi ilmiah mengenai perubahan dalam jumlah, struktur umur dan jenis kelamin, dan persebaran penduduk yang disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, serta keterkaitannya dengan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Analisis demografi bermanfaat untuk mempelajari perubahan penduduk serta determinan dan konsekuensinya pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.

Ukuran-ukuran demografi dapat digolongkan menjadi ukuran absolut dan relatif. Ukuran absolut adalah jumlah absolut (banyak). Ukuran relatif terdiri dari angka, persentase, proporsi, rasio, insidens, dan proporsi.

Data kependudukan adalah informasi yang berupa angka tentang karakteristik penduduk suatu populasi. Sumber data kependudukan utama adalah registrasi vital, sensus penduduk, dan survei penduduk. Data kependudukan dapat berbeda menurut sumbernya yang disebabkan karena perbedaan dalam konsep dan definisi, cara, waktu, sampel populasi pengumpulan data, serta metode estimasi.

B. Evaluasi

Buatlah suatu esai (satu halaman) tentang pentingnya pemahaman demografi di kalangan pembuat kebijakan dan pengambil keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). 2018. Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. BAPPENAS: Jakarta.
- Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2010. Dasar-dasar Demografi. Edisi 2. Editor: S.M. Adioetomo dan O.B. Samosir. Depok, Indonesia
- Rajagukguk, W. 2010. Pertumbuhan Penduduk sebagai Faktor Endogen dalam Pertumbuhan Ekonomi. Disertasi Doktor pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siegel, J.S. and David A. Swanson. 2004. The Methods and Materials of Demography. Second Edition. Elsevier Academic Press. California, USA.
- United Nations (UN). 2019. World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019).